

Penggunaan Sistem Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Pelaporan Pajak Pada Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi

Nur Azizah¹, Hanin Syarifah², Retno Ayu Wulandari³, Moh. Haris Balady⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah, Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
Email: zhapoland@gmail.com, hnsrnf@gmail.com, ayuretno212377@gmail.com, Harisbalady@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 13, 2024

Revised March 14, 2024

Accepted March 16, 2024

DOI.10.61930/jurnaladm/v2n1

Kata Kunci:

Sistem, Elektronik, Bukti Potong (E-Bupot), Pelaporan Pajak

Keywords:

System, Electronic, Withholding Proof (E-Bupot), Tax Reporting



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Nur Azizah, et.al Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picomotiv

ABSTRAK

Dalam lingkungan usaha , baik perseorangan maupun instansi pemerintah , terdapat kewajiban untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 16 UU Tahun 2009. berupa orang perseorangan atau badan hukum yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak . mempunyai hak dan kewajiban terkait pajak yang perlu dipenuhi. diterapkan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya adalah E - bupot. sebuah aplikasi dompet elektronik yang kadang disebut dengan penyatuan E-Bupot. Aplikasi memudahkan pegawai pajak untuk memverifikasi data dan melakukan transaksi online serta memfasilitasi pembuatan invoice dan fakta elektronik dalam satu platform yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data. Penggunaan E menggunakan- Bupot pada bidang terkait konstruksi mempunyai darikhusus untuk penanganan pajak. E-Bupot pada bidang yang berhubungan dengan konstruksi mempunyai manfaat khusus untuk penanganan pajak. dokumen resmi berfungsi sebagai pedoman pembayaran dan pemungutan pajak oleh badan

usaha yang membayar pajak dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional Indonesia. Arti penting dari bukti potong elektronik ini adalah karena kekurangannya , pengusaha kena pajak tidak dapat dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) . Tujuan penerapan sistem elektronik ini adalah untuk mengefektifkan proses penggantian pajak

ABSTRACT

In the business environment, both individuals and government agencies, there is an obligation to implement policies in accordance with the provisions of tax laws and regulations, as referred to in paragraph (2) of Article 16 of the 2009 Law. in the form of individuals or legal entities which include tax payers, withholders, and collectors. have rights and obligations related to taxation that need to be fulfilled. applied using applications developed by the Directorate General of Taxes, one of which is E-bupot. an electronic wallet application sometimes referred to as E-Bupot unification. The application makes it easier for tax officials to verify data and conduct online transactions and facilitates the creation of electronic invoices and facts in one integrated platform. This research uses data collection and analysis methods. The use of E using- Bupot in construction-related fields has special benefits for handling taxes. E-Bupot in construction-related fields has special benefits for handling taxes. official documents serve as guidelines for payment and collection of taxes by business entities that pay taxes and contribute to Indonesia's national economy. The significance of this electronic proof of deduction is that due to its shortcomings, taxable entrepreneurs cannot be compared with the Annual Income Tax Return

(SPT PPh). The purpose of implementing this electronic system is to streamline the tax reimbursement process.

Pendahuluan

Pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Ketika kewajiban pajak terpenuhi dengan lebih lanjut, infrastruktur dan fasilitas akan dibangun, menjadikan pajak sebagai pendorong utama pembangunan nasional. Pajak memiliki peran sentral dalam memajukan pembangunan nasional. Dalam perspektif Hukum Pertanahan dan Hukum Umum, pajak adalah pembayaran yang diwajibkan kepada negara oleh individu atau badan hukum yang diakui sebagai badan hukum. Pembayaran ini tidak dapat dihindari dan bersifat legal. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mencapai kemakmuran bagi rakyat.

Aplikasi E-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau jalur resmi lain yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat bukti Pemotongan atau Pemungutan Unifikasi, serta mengedit dan mencetak Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh Unifikasi).

Undang-undang E-Bupot saat ini diundangkan sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan nasional atau mengatasi permasalahan yang mengganggu stabilitas keuangan nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan sebuah metodologi pengumpulan dan analisis data yang melibatkan penggunaan aplikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berpartisipasi (*participant observation*), terutama dalam konteks penggunaan aplikasi di bidang perangkat lunak konstruksi bangunan, terutama terkait dengan aspek finansial dan manajemen waktu. Observasi dilakukan selama minggu pertama dari praktik lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode pemutakhiran data dengan menggunakan aplikasi. Konsep pembaruan berasal dari kata *upgrade*, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *update* berarti memperbaiki. Secara umum, data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh melalui observasi, dapat berupa angka, simbol, atau ciri-ciri yang menggambarkan suatu keadaan atau masalah. Data juga dapat merujuk pada informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan terhadap suatu objek. Untuk memastikan informasi yang andal, komprehensif, tepat waktu, dan relevan, diperlukan pembaruan data secara berkala.

Pemutakhiran data adalah proses untuk memperbaiki data sesuai dengan keadaan objek saat ini, yang biasanya dilakukan setelah validasi data. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi yang telah dipublikasikan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Fitur E-Bupot Unifikasi pada aplikasi web DJP sangat membantu pengguna dalam melaksanakan pekerjaan perpajakan. Aplikasi web DJP sangat membantu pengguna dalam melaksanakan pekerjaan perpajakan. Karena bermanfaat juga bagi masyarakat

masyarakat umum. E-Bupot Unifikasi yang diterapkan oleh Departemen Umum Pajak memiliki banyak keunggulan.

Beberapa keunggulan diantaranya adalah kemampuan untuk menetapkan batas waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban memberikan pemberitahuan bahwa aplikasi sangat membantu informasi pengguna. Pembuatan pungut/bukti potong berbagai jenis PPh. Bukti potong dapat divalidasi secara otomatis dan tegas oleh DJP. Akibatnya, dalam hal ini Pihak Dinas dan pengguna lainnya tidak terlalu ingin memasukkan data lain dan Bukti potong dapat dimasukkan secara diam - diam . Oleh karena itu, dalam hal ini, Pihak Dinas pengguna lain tidak membuang waktu untuk tugas-tugas yang membosankan, terutama saat mengenkripsi data penting. Selain itu ke E-Bupot Unifikasi juga mempunyai kendala pada server outage atau trafik yang padat karena banyak orang yang menggunakannya. Akibatnya terkadang terjadi kesalahan input data atau postingan yang tidak lengkap. E- Bupot Unifikasi juga mempunyai kendala pada server out-age atau trafik yang padat karena banyak orang yang menggunakannya. Akibatnya terkadang terjadi kesalahan input data atau postingan yang tidak lengkap.

2. Pembahasan

Kemajuan teknologi di dunia tidak hanya disebabkan oleh perkembangan teknologi itu sendiri, pemerintah juga memainkan peran penting dalam kemajuan teknologi melalui Direktorat Jenderal Pajak, terutama melalui implementasi aplikasi Bukti Pemotongan Elektronik (E-Bupot).

Dalam rangka penelitian ini, penggunaan Sistem Elektronik (E-Bupot) sebagai sarana pelaporan pajak bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Penerapan otomatisasi dalam aplikasi E-Bupot memberikan manfaat bagi pengguna dengan membantu mereka mengatur waktu dan tenaga secara lebih efektif dalam menangani pekerjaan.

Simpulan

Secara umum, e-Bupot Unifikasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan pajak. Menggabungkan berbagai jenis pajak dalam satu proses juga dapat mengurangi sanksi administrasi jika pelaporan pajak terlambat.

Aplikasi E-Bupot Unifikasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas. Otomatisasi dalam aplikasi ini dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan penggunaan waktu dan tenaga yang lebih efisien. Laporan menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini membuat aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pengguna karena dapat menghemat waktu dalam memenuhi kewajiban mereka.

Daftar Pustaka

- Dra. Mujiyati, M.Si, Drs, M. Abdul Haris, M.Si. *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia* (Sukoharjo: Muhammadiyah University Press, 2021), 43.
- Jumaiyah, Adv. Wahidullah. *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik* (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2021), Edisi 1, 29.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 23/PJ/2020*. <https://djpb.kemenkeu.go.id>

KKP Nizar Hidayat, Tax and Accounting. Accessed March 01, 2023. <https://kkp-nizarhidayat.com/2023/01/11/e-bupot-unifikasi-lebih-beragam-yang-dapat-dikelola/>

Masyahrul ,Tony. *Pajak penghasilan potongan dan pungutan Pasal 21,22,23,26 UU No. 17/2000*. (PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2005), 133-134.

N. Purnomo, R. Soerjatno. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah: Teori dan Praktik (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021)*, 1-2.

Putra ,Anak Agung Gede Eka Subama. *Menakar Penerimaan Wajib Pajak atas e-Bupot dengan Pendekatan Technology Acceptance Mode*, Volume 22. No. 1, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 2021, hal 150-164.

Thian ,Alexander. *Hukum Pajak (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021)*, 5-6.

Wiyono, B. B. 2007. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research)*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Hastika, N.G. (2019). *Keabsahan Elektronik Bukti Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Utomo, Langgeng Prayitno. "Menguji Teori Fraud Triangle." *Jurnal Akuntansi dan Pajak (2018): 77-88*.

Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyaatun Rumiyaatun. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi 5.1 (2017): 15-24*.

Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Konsultan Pajak*. <https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan> Di akses pada tanggal 20 Agustus 2021